

British's Bush On The Iberian Peninsula: Analisis Sekuritisasi Inggris Terhadap Sovereignty & Dilema Keanggotaan Schengen Gibraltar Pasca-Brexit

Aura Azzahra Adriesa
Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
aura.adriesa@gmail.com

Wishnu Mahendra Wiswayana
Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
wishnu.mahendra@ub.ac.id

Abstract

This study examines the securitization strategy advanced by the UK government concerning Gibraltar's sovereignty and its fraught relationship with Schengen membership in the post-Brexit period. The research focuses on border control methods and official statements and how Gibraltarians react to these measures as their main point of object referent. The research establishes new knowledge through its investigation of speech acts and public opinions and its evaluation of state actions which convert border matters into national security threats. The research uses qualitative case-study methodology to analyze secondary documents which include official statements and legislative instruments such as the Protocol on Gibraltar and related agreements and media reports and discourse analysis. The research reveals three connected systems which work together to achieve their goals: (1) Speech acts serve to validate British control over UK Overseas Territory; (2) Gibraltarians support British sovereignty yet they want to maintain their European freedom of movement; (3) The UK implements three exceptional border control systems which combine military patrols with dual identification checks and special border procedures to defend their sovereignty while creating more travel obstacles. The research establishes a direct link between political statements and actual border changes and institutional developments which shows that securitization like used as function to maintain current sovereignty structures (status quo) instead of creating lasting solutions for border movement. The research results include vital policy recommendations which impact multilevel negotiations that occur on the Iberian Peninsula.

Keywords: *Border; Gibraltar; Post-Brexit; Schengen; Securitization; Sovereignty; UK.*

Article History: Received 30 September 2025, Revised 15 October 2025,
Accepted 31 October 2025, Available online 02 November 2025

Copyright: © 2025. The Authors.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International

Abstrak

Penelitian ini menelusuri strategi sekuritisasi yang diusung Pemerintah Inggris terkait isu kedaulatan Gibraltar serta pergulatan keanggotaannya di zona Schengen pasca-Brexit. Sorotan utama diarahkan pada praktik pengelolaan perbatasan, wacana resmi, sekaligus respon masyarakat Gibraltar yang dijadikan sebagai objek referen utama. Tujuan studi adalah untuk menutup celah penting dalam literatur melalui analisis empiris yang mengaitkan konstruksi kebahasaan (*speech acts*) dengan persepsi publik serta menelusuri penerapan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary measures*) ketika negara berupaya memindahkan perdebatan perbatasan ke ranah keamanan nasional yang dipandang mengancam. Metode yang dipakai berupa studi kasus kualitatif. Pendekatan yang diadopsi mengandalkan telaah dokumen sekunder, meliputi pengkajian pernyataan resmi, berkas legislatif, (termasuk Protokol Gibraltar serta perjanjian-perjanjian terkait), ulasan media, dan penelaahan wacana linguistik. Temuan utama menunjukkan tiga mekanisme kunci—(1) *speech acts* sebagai bentuk legitimasi kedaulatan Inggris, (2) penerimaan bersyarat oleh *Gibraltarians* yang simultan mendukung kedaulatan tetapi menghendaki mobilitas Eropa, dan (3) *extraordinary measures* (*dual biometrics border checks*, penguatan militer dan klausul protokol)—yang bersama-sama memungkinkan Inggris menegaskan kontrol kedaulatan sekaligus memperburuk dilema mobilitas. Kebaruan studi ini terletak pada penghubungan empiris antara wacana politis dan perubahan institusional/perbatasan yang menjadikan sekuritisasi lebih berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan status quo kedaulatan daripada sebagai solusi mobilitas pada perbatasan yang berkelanjutan, dengan implikasi kebijakan yang kritis bagi negosiasi multilateral di Semenanjung Iberia.

Kata Kunci: Gibraltar; Kedaulatan; Inggris, Perbatasan; Post-Brexit, *Schengen*, Sekuritisasi.

Pendahuluan

“*As safe as the Rock of Gibraltar*”, adalah ungkapan paling krusial dalam sejarah panjang wilayah ‘*the hard rock*’ tersebut. Gibraltar secara resmi ditetapkan sebagai Wilayah Luar Negeri Inggris Raya (*British Overseas Territory*), terletak di ujung selatan Spanyol, tepatnya di Semenanjung Iberia, yang merupakan gerbang strategis menuju Laut Mediterania dan Samudra Pasifik. Terlebih, Gibraltar berfungsi sebagai tembok pertahanan atau simbol kekuatan Inggris di Mediterania. Gibraltar juga berperan sebagai jalur penting dalam navigasi maritim internasional, melintasi perairan internasional paling sibuk di dunia. Geografisnya menguntungkan posisi Gibraltar sebagai jalur transit perdagangan global dan merupakan penghubung antara Eropa dan Afrika.¹ Luas wilayahnya mencapai 2½ mil persegi dihuni oleh hampir 34.000 jiwa. Populasinya beragam dengan komposisi multiras dari mulai Inggris, Genoa, India, Italia, Malta, Minorca, Maroko, Portugal, Sardinia, dan Spanyol.

Perang Suksesi yang melibatkan Inggris dan Spanyol tahun 1701 sampai dengan 1714 memiliki hasil akhir atas kedaulatan Inggris terhadap wilayah Gibraltar. Hasil akhir ini dilegitimasi dalam Perjanjian Utrecht (*Treaty of Utrecht*) tahun 1713 dimana wilayah Gibraltar “berpindah tangan” dan jatuh kepada pemerintah Inggris setelah beberapa perang berlarut-larut yang melibatkan banyak kekuatan di Eropa.² Meskipun berada di bawah BOT, Gibraltar masih menjadi perebutan antara Inggris dengan Spanyol karena letaknya yang strategis, salah satunya pada tahun 1904, Sir John “Jackie” Fisher, mantan Laksamana Armada Royal Navy, mengungkapkan bahwa Gibraltar merupakan “one of the five keys that lock up the world”. Tak hanya itu, ketidakpuasan Spanyol atas pemberian wilayah dan kedaulatan Gibraltar kepada Inggris secara sepihak pasca perang mampu menjadi motif ‘high hostility’ kedua negara dalam perundingan negosiasi perbatasan yang tak kunjung usai, serta memperparah eskalasi sengketa perbatasan (*border dispute*) antara Spanyol sebagai bagian dari *Schengen* dengan Inggris pasca-Brexit. Tulisan Michal Gapsa (2022) mendukung argumen ini dengan menyertakan temuan bahwa Gibraltar selalu menjadi subjek perselisihan Inggris-Spanyol yang tak henti-hentinya terkait status kedaulatannya.³

Secara historis, Gibraltar memiliki sejarah panjang yang mengindikasikan keterikatannya dengan Britania Raya bahkan sebelum diresmikannya putusan *Brexit*. Dalam referendum di tahun 1968, penduduk Gibraltar memilih untuk tetap bersama Inggris daripada Spanyol. Dengan jumlah yang cukup signifikan, dengan 12.762 orang memilih untuk tetap bersama Inggris dan hanya 44 orang dari total partisipan di referendum memilih untuk bergabung dengan Spanyol. Sikap yang tidak berubah untuk tetap menjadi bagian dari Inggris telah memperkuat anggapan bahwa penduduk Gibraltar adalah orang Inggris, bukan orang Spanyol. Adanya keterikatan ini memunculkan istilah “*anti-Spanishness of Gibraltar*,” yang tidak hanya berasal dari orang-orang yang lahir di Gibraltar, melainkan juga dari orang-orang yang lahir di Spanyol.

Sebelum *Brexit*, kebebasan berpindah (*free movement of people*) di wilayah *Schengen*/Uni Eropa bagi warga Wilayah Seberang Laut Britania (UKOT) yang memiliki kewarganegaraan Britania Raya diatur dalam Pasal 20 Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa (TFEU). Pasal 20(1) menegaskan bahwa ‘*Setiap individu yang memegang kewarganegaraan suatu Negara Anggota merupakan warga Uni Eropa*’, sementara Pasal 20(2) menambahkan bahwa ‘*Warga Uni Eropa berhak atas hak-hak dan tunduk pada kewajiban yang diatur dalam Perjanjian-perjanjian*’. Hak-hak kewarganegaraan ini dirangkum dalam Pasal

20(2) dan dijabarkan secara rinci dalam Pasal 21–24 TFEU, termasuk klausul 'Setiap warga Uni Eropa berhak untuk berpindah dan tinggal secara bebas di wilayah Negara-Negara Anggota'.⁴

Seluruh klausa ini secara otomatis berlaku bagi warga negara Gibraltar untuk melewati seluruh perbatasan *Schengen* secara bebas sebagai warga negara Inggris sebelum Brexit. Terlebih, akses ke pasar tunggal UE memegang peran vital bagi Gibraltar. Sektor perdagangan maritim dan industri *online gaming* yang menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja—setara dengan lebih dari 18% lapangan pekerjaan di sektor swasta—tumbuh pesat berkat akses *Schengen* tersebut. Selain itu, Gibraltar memiliki kepentingan besar dalam jasa investasi, asuransi, dan perbankan. Industri-industri ini didukung oleh kesepakatan Uni Eropa yang memungkinkan lembaga berlisensi di Gibraltar menyediakan layanan di seluruh wilayah UE tanpa memerlukan otorisasi terpisah di negara anggota tuan rumah—hak yang dikenal sebagai *passporting rights*.⁵

Sayangnya, fenomena Brexit telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika politik di Eropa, termasuk dampaknya terhadap hubungan antara Inggris dan negara-negara Uni Eropa lainnya. Pemungutan suara pertama Inggris Raya (UK) dalam referendum pada 23 Juni 2016 lalu menggemparkan seantero Eropa dengan hasil 52% pemilih memilih Inggris Raya setuju dan mendukung Inggris untuk keluar dari Uni Eropa.⁶ Menandai putusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa pada tahun 2020.

Akibatnya, ketika UK mengaktifkan Pasal 50 TEU untuk menarik diri dari Uni Eropa dan resmi melakukan *Brexit*, Gibraltar secara otomatis keluar dari Uni Eropa.⁷ Penerapan Pasal 50 *Treaty of European Union* terhadap Gibraltar menegaskan bahwa wilayah yang berada di bawah kedaulatan negara anggota yang keluar dari Uni Eropa juga akan mengikuti status hukum negara tersebut, kecuali ada perjanjian khusus yang mengatur sebaliknya. Hal ini selaras dengan Pasal 355(3) TFEU [sebelumnya Pasal 299(4) TEC], yang menyatakan bahwa "wilayah-wilayah Eropa yang hubungan eksternalnya menjadi tanggung jawab suatu Negara Anggota". Kasus Gibraltar ini membedakannya dari wilayah-wilayah seberang laut Inggris (UK Overseas Territories) lainnya, yang umumnya tidak termasuk dalam yurisdiksi UE.⁸ Gibraltar merupakan satu-satunya wilayah yang tercakup dalam klausul ini.

Hal ini terjadi karena secara konstitusional, Gibraltar tidak terintegrasi secara formal ke dalam struktur kenegaraan Britania Raya (UK), melainkan

berstatus sebagai Wilayah Seberang Laut Britania (*British Overseas Territory/BOT*) yang tunduk di bawah kedaulatan UK. Namun, dalam kerangka hukum Uni Eropa (UE), Gibraltar diakui sebagai bagian integral dari UE melalui ketentuan Pasal 227(4) Perjanjian Roma 1957. Akibatnya, secara *de jure*, Gibraltar dan UK dipandang sebagai entitas tunggal yang sama-sama merupakan negara anggota UE.⁹

Namun, integrasi Gibraltar ke dalam UE bersifat terbatas (*sui generis*), karena dikecualikan dari sejumlah kebijakan vital UE, seperti Kebijakan Pertanian dan Perikanan Bersama (*Common Agricultural and Fisheries Policy*), harmonisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN/VAT), rezim Uni Pabean, serta prinsip Perdagangan Bebas Barang. Sehingga, keputusan politik UK secara otomatis mengikat Gibraltar untuk ikut keluar (*exit*) dari UE tanpa opsi hukum independen. Sejalan dengan pernyataan Inggris, dimana dalam kerangka pemerintahan Gibraltar, otoritas lokal memiliki kewenangan penuh untuk mengelola seluruh aspek domestik, dengan pengecualian pada empat bidang strategis: pertahanan nasional, hubungan luar negeri, stabilitas keamanan dalam negeri, serta fungsi yudikatif (peradilan). Kewenangan atas keempat bidang tersebut secara eksklusif hanya dipegang oleh Pemerintah Britania Raya.¹⁰

Dilema ini diperparah oleh status konstitusional Gibraltar yang *sui generis* dalam hukum internasional. Sebagai wilayah dependensi, Gibraltar tidak memiliki personalitas hukum internasional (*international legal personality*), termasuk ketiadaan *ius contrahendi*—kewenangan untuk merundingkan atau meratifikasi perjanjian internasional secara mandiri. Dengan demikian, Gibraltar tidak dapat menginisiasi atau mempertahankan hubungan bilateral apapun dengan UE di luar kerangka kedaulatan UK, sekalipun untuk tujuan mempertahankan status khusus (*ad hoc*) pasca-Brexit.¹¹ Sehingga, logika permasalahan ini dapat dilihat dari konteks Inggris sebagai *state actor* resmi yang melakukan sekuritisasi dengan membawahi negosiasi status keamanan Gibraltar.

Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada adanya negosiasi lanjutan yang mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan konsekuensi Gibraltar dengan merujuk pada hukum internasional. Merujuk pada pasal dan regulasi UE, konsekuensi Gibraltar adalah “meninggalkan Schengen” mengikuti Inggris sebagai negara induknya. Namun, permasalahan kemudian terlihat dari adanya negosiasi lanjutan untuk kasus sengketa kedaulatan Gibraltar yang

diupayakan untuk tetap menjadi bagian dari *Schengen Agreement*. Negosiasi lanjutan ini masih terus berlangsung antara Inggris-Spanyol, dengan pertimbangan pilihan apakah (1) Gibraltar tetap ikut serta dalam Perjanjian Schengen (*Schengen Agreement*) secara mandiri dengan persetujuan Inggris, atau (2) memberikan otoritas pengaturan wilayah dan kontrol perbatasannya dibawah regulasi pemerintah Spanyol, yang juga harus melalui *approval* dan *acknowledgment* Inggris, guna memfasilitasi pergerakan perbatasan serta mempermudah aktivitas mobilisasi, khususnya bagi para tenaga kerja.

Namun, melihat dari logika *standpoint* Inggris, peneliti berupaya untuk menjelaskan perilaku Inggris yang telah melakukan proses sekuritisasi atas dilema keanggotaan *Schengen* Gibraltar pasca-Brexit melalui konstruksi linguistik *speech act* yang diwarnai narasi keamanan tingkat tinggi dalam penjagaan perbatasan dan kedaulatan, disertai dengan upaya Inggris dalam melakukan langkah-langkah luar biasa untuk memproteksi keutuhan wilayah Gibraltar sebagai bagian dari UKOT/*British Overseas Territory* (BOT). Oleh karena itu, artikel ini akan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses sekuritisasi Inggris terhadap *Sovereignty* dan Dilema Keanggotaan *Schengen* Gibraltar pasca-Brexit dilakukan.

Kerangka Teori Sekuritisasi oleh Barry Buzan, Ole Wæver, De Wilde (Copenhagen School)

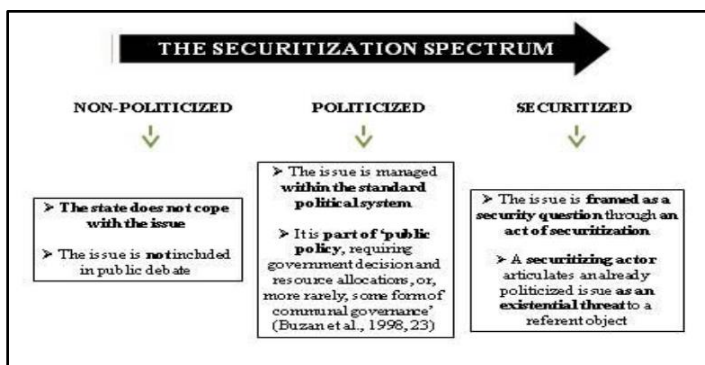
The Copenhagen School merupakan salah satu aliran pemikiran *post-positivisme* dalam kajian Hubungan Internasional yang menawarkan perspektif baru dalam kajian studi keamanan. *Copenhagen School* bermula dari beberapa peneliti di *Copenhagen Peace Research Institute* – yang didirikan pada tahun 1985 di Copenhagen, Denmark. Salah satu karya paling terkenal *Copenhagen School* adalah "*Security: A New Framework for Analysis*" yang ditulis bersama oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, yang dipublikasikan pertama kalinya pada tahun 1998. Mazhab *Copenhagen School* menghasilkan beberapa variasi teoritis, diantaranya seperti Keamanan Regional Kompleks (*Regional Security Complex Theory*), Keamanan Masyarakat (*Societal Security*), dan Sekuritisasi (*Securitization*).¹²

Kerangka teori sekuritisasi yang disajikan oleh *Copenhagen School* selaras dengan pendekatan konstruktivis, yang menitikberatkan asumsinya pada perubahan wacana dan linguistik dalam Hubungan Internasional dan studi keamanan. Teori sekuritisasi merujuk pada asumsi dasar bahwa isu keamanan sejatinya merupakan hasil konstruksi subjektif dari aktor tertentu terhadap

suatu entitas yang dianggap sebagai ancaman, yang kemudian disetujui oleh *audience*.¹³

Buzan, Waeber, dan De Wilde juga mengelaborasi adanya 3 (tiga) kategorisasi atau spektrum keberhasilan dalam proses sekuritisasi, mencakup: 1) tahap non-politis (*non-politicized*), 2) tahap politisasi (*politicized*), dan 3) tahap tersekuritisasi (*securitized*).

Gambar 1. Spektrum Sekuritisasi



Sumber: (Emmers, 2016)¹⁴

Sekuritisasi dapat pula didefinisikan bagaimana negara melakukan peningkatan level suatu isu, yang semula bukan merupakan isu keamanan, dapat kemudian “diangkat” menjadi suatu isu keamanan nasional karena dianggap sebagai suatu ancaman setelah melalui beberapa tahapan tertentu. Dalam proses sekuritisasi, Buzan, et.al. (1998) mengklasifikasikan beberapa elemen-elemen yang saling terikat, meliputi: *Existential Threat* (ancaman bagi referent object– Spanyol); *Referent Object*, merujuk pada pihak yang dipandang sebagai suatu entitas yang keberadaannya terancam–*Gibraltarians*); *Securitizing Actors*, pihak yang melakukan proses sekuritisasi–Inggris); *Significant Audience* (aktor pendukung–UE); *Extraordinary Measures*.

Sekuritisasi terdiri dari berbagai tahapan guna mencapai keberhasilan dari sekuritisasi itu sendiri, mencakup: *Speech Act* yang dilakukan oleh *Securitizing Actors*, *Acceptance by The Audience* oleh *Referent Object*, hingga adanya aksi atau tindakan nyata melalui *Extraordinary Measures* atau *Emergency Actions* oleh aktor yang melakukan sekuritisasi guna mengatasi ancaman.¹⁵

Speech Act merujuk pada tahapan pertama dalam proses sekuritisasi. *Speech Act* merujuk pada tindak tutur kata secara verbal yang mengindikasikan adanya sekuritisasi yang dilakukan oleh para aktor dalam membingkai sebuah isu sebagai isu ancaman keamanan terhadap objek acuan yang ingin dilindungi dari *existential threat*. "...*The process of securitization is what in language theory is called a 'speech act'...*".¹⁶ Elemen *speech act* ini ditujukan kepada publik (tingkat nasional maupun internasional) dengan tujuan menggiring opini publik melalui konstruksi pembahasaan/linguistik atau penyesuaian tata penggunaan bahasa, dengan memberikan penggambaran urgensi dan pemahaman secara luas bahwa isu yang sedang dihadapi suatu negara merupakan ancaman.

Tahapan selanjutnya dalam proses sekuritisasi adalah penerimaan yang didasarkan atas persetujuan oleh audiens. Dalam tulisannya, Buzan et.al. mendeskripsikan bahwa, "...*the issue is securitized only if and when the audience accepts it as such...*". Tahapan terakhir dalam proses sekuritisasi adalah *extraordinary measures*, yang merujuk pada tindakan luar biasa atau langkah-langkah darurat, "...*a successful securitization thus has three components (or steps): existential threats, emergency actions, and effects on interunit relations by breaking the free rules...*".¹⁷ Dalam konteks permasalahan Gibraltar, tindakan *extraordinary measures* ini dapat merujuk pada beberapa tindakan, misalnya kontrol perbatasan khusus (*special border control*), pengiriman militer, perubahan undang-undang, negosiasi atau referendum terkait isu keanggotaan *schengen* Gibraltar pasca-Brexit dengan pihak yang dianggap sebagai ancaman, hingga pengalokasian sistem biometrik dan infrastruktur terintegrasi sebagai bentuk kontrol perbatasan baru.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan berbasis *case study*. Penelitian kualitatif merujuk kepada jenis penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan menjelaskan fenomena sosial. Penelitian kualitatif yang berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*) memanfaatkan bukti intrakasus (*within-case evidence*) untuk menguji model-model teoritis yang diajukan guna menjawab pertanyaan penelitian.¹⁸

Metode studi kasus merupakan sekelompok pendekatan dalam ilmu politik dan hubungan internasional yang bertujuan untuk menguji serta mengembangkan teori.¹⁹ Sedangkan teori dapat dipahami sebagai model

mental yang dirancang untuk memahami realitas—baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, maupun memprediksi fenomena yang diamati.²⁰

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*secondary source*). Teknik pengumpulan data sekunder merujuk pada proses pengumpulan data penelitian yang diperoleh melalui telaah tinjauan pustaka terdahulu (*literature review*), kajian literatur ilmiah terkait dinamika keanggotaan *schengen* Gibraltar pasca-Brexit melalui sumber-sumber seperti buku, *thesis*, jurnal, artikel, internet, pernyataan pemerintah, media, dokumen resmi, data statistik, maupun berita melalui situs resmi dari instansi terkait, serta data relevan lainnya yang disuguhkan guna membantu proses penulisan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan merujuk pada teknik kualitatif-interpretatif Miles & Huberman (2018) dengan 3 (tiga) tahapan utama, yakni: proses kondensasi data/proses penyederhanaan temuan melalui reduksi data (*data reduction*), penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.²¹

Hasil dan Pembahasan

Deklarasi Inggris: Tindak Tutur (Speech Act), Legitimasi Linguistik, dan Kedaulatan Gibraltar (BOT)

“.....*The Strategic Defence Review* menyatakan: “..*The UK’s Overseas Bases remain a critical element of the IGDN [Integrated Global Defence Network] in defending UK sovereign territory, shaping UK interests.....*”²²

The Strategic Defense Review yang secara resmi dikeluarkan oleh UK HM Government dengan tajuk, “*Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defence and Security Review*”, secara tegas menyatakan Tujuh Tugas Militer (*Seven Military Tasks*) yang meliputi penjagaan pertahanan Inggris beserta Wilayah Seberang Lautnya (*British Overseas Territory*) yang secara eksplisit tertuang dalam agenda resmi pertahanannya. Kementerian Pertahanan Inggris menegaskan bahwa Gibraltar tetap menjadi pangkalan strategis yang sangat penting bagi Inggris, seiring dengan peningkatan kesiapan Inggris dalam menghadapi potensi konflik militer. Pemerintah Inggris menyatakan bahwa ancaman yang dihadapi saat ini jauh lebih serius dan tidak dapat diprediksi dibandingkan dengan periode pasca Perang Dingin, bahkan menyebut Inggris telah menyiapkan diri untuk “*war-fighting readiness*”.

Dalam kerangka teori sekuritisasi *Copenhagen School*, tindak tutur (*speech act*) merupakan tindakan pernyataan yang melabeli suatu isu sebagai ancaman eksistensial sehingga memungkinkan penggunaan cara-cara luar biasa.

Sebagaimana dijelaskan Buzan *et.al*, keamanan dipahami sebagai “tindak tutur adalah saat dimana aktor sekuritisasi menyatakan ancaman terhadap objek referen tertentu melalui tindak tutur atau penggunaan *speech act*, serta mendeklarasikan ancaman eksistensial yang membenarkan penggunaan cara-cara luar biasa”.²³ Dalam konteks Gibraltar pasca-Brexit, Pemerintah Inggris bertindak sebagai aktor sekuritisasi yang menempatkan kepentingan kedaulatan dan keamanan Gibraltar sebagai objek referen utama (*referent object*). Pemerintah Inggris secara eksplisit menyatakan bahwa mereka tidak akan menyetujui setiap pengaturan yang mengancam kedaulatan Gibraltar melalui pernyataan resmi: “...*The UK is steadfast in our support for Gibraltar and will not agree to anything that compromises sovereignty...*”²⁴.

Tindak tutur Inggris dalam mengamankan Gibraltar sebagai *referent object* juga tercermin dalam pernyataan sikap resmi *UK's House of Commons* pada tanggal 26 November 2024, yang secara eksplisit menegaskan bahwa pemerintahan Inggris tidak akan menegosiasikan apapun yang terkait dengan pemindahtanganan kedaulatan Gibraltar ke bangsa atau negara lain tanpa persetujuan *Gibraltarians* melalui pernyataan sebagai berikut:

*“.....The Government continues to work side by side with the Government of Gibraltar to conclude a Treaty and will only agree to terms that the Government of Gibraltar is content with. This is part of our commitment to the double lock – that we will never enter into arrangements under which the people of Gibraltar would pass under the sovereignty of another State, against their freely and democratically expressed wishes. And we will never enter into a process of sovereignty negotiations with which Gibraltar is not content....”*²⁵

Pernyataan yang diucapkan oleh pejabat tinggi Inggris ini menegaskan bahwa integritas wilayah Gibraltar merupakan bagian dari agenda keamanan nasional Inggris. Menteri Luar Negeri Inggris (*Foreign Minister*), David Lammy, juga menegaskan bahwa tanpa adanya kesepakatan secara khusus, sistem perbatasan baru yang diperkenalkan oleh Uni Eropa yakni “*hard border*” hanya akan merugikan Inggris dan perekonomian Gibraltar: “.....*wreck the territory's economy and possibly cost it hundreds of millions of pounds a year....*”²⁶. David Lammy dalam kapasitasnya sebagai *Foreign Secretary* bahkan mendemonstrasikan kontinuitas *speech act* dengan situasi ini “.....*inherited a situation which left Gibraltar's economy and way of life under threat....*”. Penggunaan diksi “*threat*” atau ancaman secara eksplisit mengindikasikan

adanya bahaya dalam integritas keamanan Inggris dan masyarakat Gibraltar yang terancam. Konstruksi linguistik ini secara eksplisit menggambarkan tidak tercapainya kesepakatan sebagai skenario bencana—narasi klasikal dalam sekuritisasi yang menjadikan aksi pengecualian sah demi menangkal ancaman eksistensial.

Selain itu, Inggris menekankan keutuhan kedaulatannya melalui perundingan akhir dengan Spanyol dan Uni Eropa, yang mengindikasikan tindakan Inggris menyepakati klausa regulasi yang “secara eksplisit dapat melindungi kedaulatan UK atas Gibraltar”.²⁷ Pilihan kata “*melindungi*” mengimplikasikan bahwa kedaulatan Inggris dianggap terancam jika Gibraltar terlalu terintegrasi dengan UE, sehingga isu keanggotaan *Schengen* digeser ke ranah *national-security*. David Lammy juga menepis anggapan publik bahwa Gibraltar akan bergabung ke *Schengen* dengan mengatakan bahwa hal tersebut “...*was never on the table*...”.²⁸ Ungkapan ini mengindikasikan adanya penegasan mutlak bahwa perbincangan terkait dengan status kedaulatan Gibraltar tidak perlu dipertanyakan, tidak akan pernah dipindahtangankan, bahkan tidak perlu dibicarakan. Pernyataan ini bertujuan untuk mengendalikan narasi keamanan, yakni bahwa kedaulatan dan kontrol perbatasan tetap di tangan Inggris, serta menggambarkan setiap isu pelibatan pengawasan UE sebagai kabar bohong yang mengancam keamanan nasional.

The Rt. Hon Priti Patel, Member of the Parliament (Conservative MP For Witham) Kerajaan Inggris juga mengatakan: “...*Gibraltar is British, end of, and we will remind the Government exactly where the sovereignty of Gibraltar lies*”.²⁹ Pernyataan resmi ini sekali lagi menyatakan secara tegas dan penuh penekanan bahwa kedaulatan Gibraltar adalah milik Inggris, dan tidak dapat diganggu gugat. Kompilasi pidato dan pernyataan resmi ini yang kemudian membentuk *speech act* yang mengkonstruksi status kepabeanan Gibraltar pasca-Brexit sebagai ancaman terhadap kepentingan Inggris dan Gibraltar, sesuai konsep sekuritisasi Buzan dkk. bahwa menyebut sesuatu sebagai “keamanan” menempatkannya dalam situasi darurat dan membenarkan dilakukannya langkah-langkah luar biasa.

Pernyataan dari figur lainnya turut mendukung aksi sekuritisasi Inggris dalam menegaskan penolakan konsisten terhadap konsep Schengen. *Chief Minister* Gibraltar, Fabian Picardo, sebagai salah satu aktor kunci dalam proses sekuritisasi melakukan *speech act* dengan mengkarakterisasi periode Brexit sebagai “*testing time*” dan menggambarkan Spanyol sebagai “*aggressor*” yang

mengancam kedaulatan Gibraltar.³⁰ Analisis *Discourse-Historical* (DHA) terhadap pidato-pidato Picardo mengungkap adanya pola konsisten dalam merujuk Spanyol sebagai ancaman, dengan menekankan identitas Gibraltar sebagai bagian dari kewarganegaraan dan kepemilikan Inggris selama bertahun-tahun. Pernyataannya yang menyebut bahwa "*....Gibraltar has been British for 312 years, and its residents are resolutely British – sharing culture, education and attitudes....*",³¹ mengindikasikan konstruksi identitas yang mendukung narasi kedaulatan Inggris. Picardo juga menekankan bahwa Gibraltar "*.....will never be Spanish, not in whole, in part, or at all.....*", yang memberikan legitimasi terhadap *speech act* pemerintah Inggris. Penggunaan diskursus kata seperti "*us*" versus "*them*" ini tampak jelas—bukan semata-mata karena Fabian Picardo secara eksplisit menyebut "Spanyol", tetapi juga lantaran menekankan kata "*never*" dalam pidatonya yang secara eksplisit memisahkan *Gibraltarians* dengan *Spaniards*.

Studi terdahulu juga menunjukkan bahwa penggunaan dikotomi semacam ini merupakan strategi simbolik guna membedakan identitas masyarakat Gibraltar dari identitas bangsa Spanyol.³² Konstruksi diskursif ini mencerminkan upaya sistematis Inggris untuk membangun legitimasi ancaman keamanan melalui narasi historis dan identitas nasional, didukung oleh hasil statistik referendum 1967 dimana 99.64% penduduk Gibraltar (12.762 vs 44 suara), serta fakta bahwa pada referendum 2002 menunjukkan adanya persentase 98% *Gibraltarians* memilih untuk tetap bersama Inggris dan menolak proposal kedaulatan bersama dengan Spanyol.

Lebih lanjut, dalam pidato kedua Fabian Picardo, ditemukan bahwa ia menggunakan istilah "*fascist*" untuk menggambarkan pernyataan Pedro Sanchez, Perdana Menteri Spanyol, terkait deklarasi EU27 dalam perjanjian penarikan serta negosiasi antara Inggris dan Uni Eropa yang dilakukan tanpa melibatkan kepentingan Gibraltar. Fabian Picardo menyatakan dalam pidatonya bahwa Pedro Sanchez bukan sekadar bertindak sebagai pemimpin negara, melainkan berperan layaknya seorang "*Generalissimo*"—pangkat tertinggi dalam militer (yang biasanya menggunakan cara-cara otoriter dalam memberikan komando yang bersifat koersif). Manifestasi *speech act* Picardo yang menyerang balik pernyataan Sanchez ini tergolong tegas karena mengasosiasikan Pedro Sanchez dengan sosok otoriter atau diktator dengan penggunaan konstruksi pembahasaan seperti "*Generalissimo*" dan "*fascist*". Hal ini juga diperkuat oleh fakta historis bahwa Pedro Sanchez pernah menutup perbatasan Spanyol dengan Gibraltar dalam rentang tahun 1965 hingga 1985.³³

Demikian pula, penelitian dari Rahmadan (2024) telah mengungkap hasil olah kuantitatif *NVivo* berupa konstruksi kebahasaan yang kerap muncul bersamaan dengan adanya indikasi *framing* Spanyol sebagai *existential threat* bagi Gibraltar pasca-Brexit. Hasil olah data Word Cloud menemukan adanya istilah atau “julukan” yang melekat pada Spanyol atas ancamannya di Gibraltar, seperti penggunaan konstruksi kebahasaan meliputi: “*claim*” beserta padanan kata nya yang muncul sebanyak lima belas kali, “*warns*” dengan total kemunculan tiga belas kali, “*threatens*” dengan jumlah penggunaan sebelas kali, dan “*snub*” sebanyak sembilan kali, yang dikaitkan dengan istilah negatif yang menggambarkan Spanyol pada masalah Gibraltar.³⁴ Temuan ini semakin menjustifikasi argumen bahwa Spanyol merupakan *existential threat* yang nyata bagi masyarakat Gibraltar, dan apapun yang akan dilakukan Spanyol terhadap Gibraltar tanpa persetujuan Inggris dapat mengancam kedaulatan Wilayah Seberang Laut Inggris dan integrasi keamanan nasional Inggris Raya.

Dalam praktiknya, aktor sekuritisasi utama yakni Inggris menggunakan berbagai saluran resmi untuk menyampaikan intensi dan penegasan kepemilikannya akan Gibraltar. Dalam pidatonya, *Lord Cameron* (Menteri Luar Negeri selanjutnya) juga menekankan bahwa pangkalan militer Inggris di Gibraltar harus terus beroperasi dan tidak akan memberikan hak pengawasan langsung kepada institusi Uni Eropa atas kebijakan imigrasi Gibraltar (dalam arti hanya Inggris yang memiliki “hak mutlak” untuk mengatur kebijakan luar negeri Gibraltar dalam mekanisme perbatasan wilayah ekstrateritorial, bukan pihak eksternal seperti Uni Eropa atau Spanyol).³⁵

Pernyataan-pernyataan tersebut dibingkai menggunakan bahasa keamanan dan kedaulatan. Pemerintah Inggris juga menekankan bahwa “Gibraltar akan selalu tetap bagian dari keluarga Inggris” menyiratkan bahwa setiap upaya yang mengancam status Gibraltar akan mengancam “perekonomian dan cara hidup Gibraltar”.³⁶ Dalam memformulasikan tindak tutur (*speech act*), aktor sekuritisasi idealnya memiliki otoritas formal—dalam hal ini pemerintah Inggris bersama jajaran petinggi Gibraltar. Secara keseluruhan, melalui tindak tutur ini, dapat ditinjau bahwa Inggris berupaya untuk membangun narasi ancaman atas kepentingannya di Gibraltar.

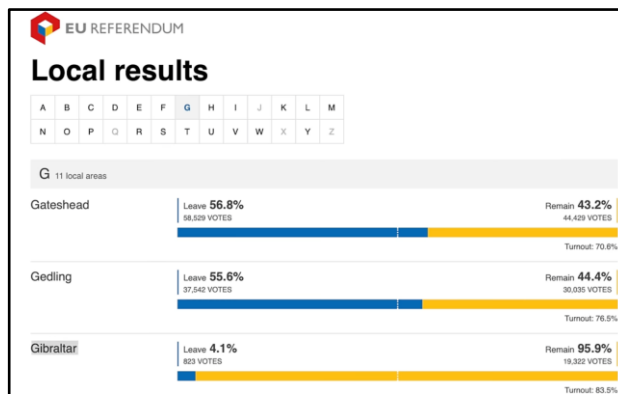
Menelaah Pergeseran Kontradiktif Gibraltarians: Paradoks Penerimaan Masyarakat Gibraltar dalam Menerima Narasi Ancaman

Tahapan *Acceptance by The Audience* dalam kerangka sekuritisasi Copenhagen School merepresentasikan momentum kritis dimana audiens

memberikan legitimasi terhadap klaim keamanan yang diajukan oleh *securitizing actors*. Audiens yang relevan dalam kasus ini meliputi masyarakat Gibraltar (*as referent object*).

Masyarakat sipil Gibraltar (*civil society*) sebagai *referent object* utama menunjukkan dukungan yang cenderung kompleks dan *nuanced* terhadap proses sekuritisasi. Data referendum 2002 menunjukkan bahwa 98.97% masyarakat Gibraltar memang secara faktual menolak pembagian kedaulatan dengan Spanyol,³⁷ yang memberikan legitimasi historis terhadap narasi kedaulatan Inggris. Namun demikian, referendum Brexit 2016 mengungkap adanya kontradiksi fundamental dimana 96% masyarakat Gibraltar memilih untuk tetap berada di dalam EU,³⁸ dimana hal ini justru menantang konsistensi dukungan terhadap sekuritisasi yang dilakukan Inggris. Hasil data statistik di situs resmi *EU Referendum* menunjukkan bahwa 95,9% *Gibraltarians* memilih untuk tetap berada di *Schengen Agreement*.

Gambar 4. Local Result: EU Referendum on Gibraltar.³⁹



Source: BBC News (n.d.)

Paradoks ini menciptakan situasi dimana *civil society* secara simultan mendukung *British sovereignty* namun menolak konsekuensi Brexit yang mengancam integrasi Eropa mereka. Masyarakat Gibraltar mendukung pendekatan ini atas dasar ketergantungan pada mobilitas bebas melintasi perbatasan. Sekitar 96% warga Gibraltar memilih tinggal di UE pada referendum 2016,⁴⁰ menunjukkan keinginan kuat untuk tetap terhubung dengan Eropa. Media *Guardian* mencatat bahwa “*absurdities*” Brexit saat ini “mengancam mata pencaharian” 34.000 penduduk Gibraltar serta 15.000 pekerja lintas-batas setiap harinya. Motif paradoks dukungan ini tidak lebih diciptakan akibat keprihatinan akan kehilangan akses Eropa yang kemudian membuat wacana

keamanan ekonomi rentan dan mobilitas sangat resonan di kalangan publik Gibraltar.

Sebagaimana disebutkan oleh Picardo, rakyat Gibraltar berusaha “tidak menjadi korban Brexit”,⁴¹ menunjukkan bahwa mayoritas menerima legitimasi narasi bahaya ekonomi dan sosial. Lebih lanjut, dalam *Discourse-Historical Analysis* (DHA), temuan menunjukkan bahwa Gibraltar sepenuhnya didukung oleh pemerintah Inggris yang jelas terlihat bagaimana Gibraltar mengidentifikasi dirinya sebagai Inggris dengan identitas Inggris, bukan Spanyol. Langkah tegas pemerintah Inggris juga memperkuat proses sekuritisasi melalui pernyataan (*speech act*) seperti: “...Gibraltar will never be Spanish, not in whole, in part, or at all...”. Ini menunjukkan terciptanya identitas Gibraltar sebagai milik Inggris dan menolak tegas berada di bawah kekuasaan bangsa Spanyol. Studi sebelumnya juga menjelaskan bahwa Gibraltar dilihat sebagai *referent object* yang cenderung “vulnerable” setelah pemerintah resmi Inggris mengeluarkan pernyataan seperti: “... a warning that a Brexit could leave the Rock vulnerable to Spanish aggressor...”. Dikotomi ini menunjukkan bahwa *acceptance by audience* sangat bersifat *conditional* dan *context-dependent*, dimana dukungan terhadap narasi sekuritisasi tidak otomatis mengimplikasikan persetujuan terhadap semua konsekuensi kebijakan.

Sejak Perang Dunia II, identitas warga Gibraltar telah dibentuk oleh beberapa faktor konkret, meliputi: kesetiaan kepada Inggris (*Britain-Loyalty*), *self-governing*, dan penentangan terhadap klaim Spanyol.⁴² *Gibraltarians* memang menyatakan bahwa walaupun mereka sangat ingin mempertahankan status *British*, kekhawatiran utama saat ini adalah kebebasan bergerak mereka dalam melintasi perbatasan antara Gibraltar dengan Spanyol (*Schengen Areas*) atas dasar pertimbangan sosial dan ekonomi. Hasil survei Jason Dittmer et., al. pada tahun 2019 menunjukkan frekuensi arus pergerakan lintas batas *Gibraltarians* yang terbagi ke dalam beberapa kategorisasi aktivitas.

(Tabel 1 dan Tabel 2).

	Crossing the border	Thinking about the border	
Less than monthly	21.8%	27.7%	Rarely
Monthly	29.8%	27.3%	Once in a while
Weekly	38.8%	23.3%	Regularly
Daily	9.7%	21.8%	Everyday

Table 1. Respondents' purposes for frontier crossing.

Purpose for border crossing	% Primary reason	% Secondary reason	Total (out of 200)
Holiday	14.7	18.5	33.2
Shopping and other errands	55.8	22.3	78.1
Visiting family and friends	12.7	16.8	29.5
Work	6.8	1.7	8.5
Health care	1.4	0	1.4
Leisure	3.1	3.8	6.9
Split residency	2.1	0	2.1
Other	2.1	1.7	3.8
No answer	1.4	35.3	36.7

Sumber: Jason Dittmer, et., al. (2019)⁴³

Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat persentase frekuensi paling tinggi mobilitas perbatasan (*crossing the border*) dilakukan ialah per minggu dengan angka mencapai 38.8%, dengan beberapa tujuan aktivitas paling banyak dilakukan adalah *shopping and other errands* (55.8%); *Holiday* (14.7%); *Visiting Family and Friends* (12.7%); dan *Work* (6.8%) sebagai tujuan utama melewati perbatasan. Namun menariknya, survei yang dilakukan tahun 2018 terhadap perilaku *Gibraltarians* terhadap konsekuensi Gibraltar pasca Brexit dan dinamika *frontier* pada perbatasan menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa perubahan dalam *border regime* akan mempengaruhi *community cohesion* dan *identity* mereka sebagai warga negara Inggris (Dittmer et.al. 2019). Data statistik juga mengindikasikan bahwa 89% responden menyatakan keprihatinan terhadap dampak yang berpotensi muncul dari Brexit pada *cross-border mobility*, sementara 76% tetap menegaskan komitmennya terhadap *British sovereignty*.

Bahkan, beberapa responden dalam hasil survei yang dilaksanakan oleh Dittmer et.al memberikan pernyataan eksplisit yang mengindikasikan “pemisahan” dan perasaan ‘*hostile*’ yang cukup tinggi oleh *Gibraltarians* terhadap orang-orang Spanyol akibat konsekuensi yang mereka alami di *frontier* perbatasan pasca-Brexit, serta ketakutan terhadap militer Spanyol yang mempersulit dan dianggap mengancam mobilisasi lintas batas warga Inggris ke wilayah Spanyol, yang tertuang dalam pernyataan seperti:

‘Nasty Spain, we keep our side, they keep theirs’. (female, age 62)

‘Sometimes fun, freedom; other times I think about the queues’. (male, age 50)

‘It is an opportunity for Gibraltar’, (male, age 68)

*‘I hope it shuts permanently, the economy will grow if it’s closed; best to be isolationist’,
(male, age 59)*

'My psychological sense of freedom would be impacted; imprisoned on the Rock due to another country's decision'. (female, 61)

'Dread. Don't know what to expect. Worry about the Spanish military police'. (male, age 35)⁴⁴

Pernyataan ini kemudian mendukung asumsi proses sekuritisasi yang perlu melibatkan persetujuan audiens sebagai *referent object* yang merasa terancam sekaligus mendukung upaya sekuritisasi oleh aktor pemerintah Inggris. Konstruksi kebahasaan seperti "*worry about the Spanish military police*" atau "*psychological sense of freedom would be impacted*" menggambarkan adanya rasa "ketakutan akan ancaman" dari militer Spanyol sebagai *existential threat* nyata bagi *Gibraltarians* baik secara material (fisik) maupun mental (psikis).

Menariknya, hipotesis dalam tulisan Jason Dittmer et. al. memang menunjukkan perbedaan antara bagaimana kalangan generasi muda dan generasi yang lebih tua memandang nasib Gibraltar pasca-Brexit. Generasi muda Gibraltar cenderung lebih terbiasa dengan mobilitas lintas batas dan memiliki kekhawatiran pragmatis terkait Brexit tanpa terlalu memandang Spanyol sebagai ancaman militer atau musuh yang harus di jauhi. Sebaliknya, generasi tua, meskipun sudah lebih heterogen akibat perputaran populasi dan imigrasi pasca-Franco yang datang dari Inggris, mereka lebih mengantisipasi dampak negatif Brexit dengan rasa kekhawatiran yang lebih mendalam terhadap Spanyol sebagai ancaman eksistensial (*existential threat*). Mereka merespons Brexit tidak hanya berdasarkan pengalaman masa lalu seperti penutupan perbatasan era Franco yang mempersulit pergerakan lintas batas, penderitaan akibat kepemimpinan otoriter, melainkan juga melalui dampak psikologis negatif berupa kekhawatiran akan terpecahnya komunitas lintas batas yang selama ini terjalin erat.⁴⁵

Menilik Posisi Akhir Kerajaan: Manajemen Perbatasan, Kebijakan Pertahanan, dan Implikasi Sekuritisasi Inggris

Tahapan *Extraordinary Measures* dalam kerangka sekuritisasi *Copenhagen School* merepresentasikan implementasi tindakan darurat yang melampaui prosedur politik normal sebagai respons terhadap ancaman yang telah disekuritisasi. Pada tahapan ini, *existential threat* yang ada dijustifikasi sebagai suatu ancaman yang sangat penting dan mendesak untuk segera diselesaikan.⁴⁶

Dalam Undang-Undang dan kerangka formal, Inggris melakukan langkah luar biasa berupa tindakan darurat dengan mengadopsi kerangka legislatif (*Legal Framework*) dibawah pasal "*Withdrawal Agreement; Protocol of Gibraltar*" dengan Uni Eropa yang secara khusus membahas status legal resmi Gibraltar pasca-Brexit. Pasca keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa, *legislation.gov.uk* mempublikasikan seluruh regulasi Uni Eropa yang telah diterbitkan hingga hari penyelesaian masa transisi (31 Desember 2020 pukul 23.00). Dalam laman tersebut, instrumen-instrumen hukum terus diperbarui secara berkala sesuai dengan amandemen yang diberlakukan oleh pemerintah Inggris pasca tanggal tersebut. *Protocol on Gibraltar* memiliki beberapa pengaturan teknis, diantaranya: a) Inggris Raya dan Uni Eropa merupakan pihak-pihak dalam *Protocol on Gibraltar*; b) Meskipun begitu, kausa-klausu (*preamble*) dalam protokol harus sejalan dengan *constitutional orders* milik Kerajaan Spanyol dan Inggris Raya, dan tidak mengurangi posisi hukum Spanyol dan Inggris mengenai kedaulatan Gibraltar dan yurisdiksi atas wilayah tersebut, serta c) Protokol ini akan diberlakukan pada masa dimulainya transisi sejak 1 Februari 2020 hingga 31 Desember 2020.⁴⁷

Beberapa poin yang termuat dalam *Protocol on Gibraltar* ditemukan mampu menjustifikasi dan memperkuat posisi Inggris sebagai "pemilik kedaulatan" atas Gibraltar. Poin-poin pasal hanya mencakup 4 (empat) ranah perjanjian bilateral/MoUs yang meliputi: 1) *citizens' rights*, 2) *tobacco and other products*, 3) *environmental cooperation and police and customs cooperation*, 4) *the adoption of an international treaty on taxation and protection of financial interests*.⁴⁸ Lebih lanjut, *Protocol on Gibraltar* secara khusus juga mengatur pembentukan Komite '*Coordination Committees on Environment and Fisheries Issues and on Police and Customs cooperations*,' yang secara resmi mengatur bea cukai masuk dan mekanisme perbatasan.⁴⁹ Lebih lanjut, *Protocol on Gibraltar* juga mengatur terkait dengan pembentukan *Specialised Committee on Gibraltar* yang bertugas untuk mengawasi implementasi protokol ini yang diatur dalam *Article 165*, terutama dalam melakukan *monitoring* terhadap *Police and Customs Cooperations* di perbatasan.⁵⁰

Meskipun kemudian pembaharuan dan amandemen pada klausu-klausu diatas masih dalam proses pertimbangan oleh kedua belah pihak. Namun justru hal ini memunculkan kebutuhan untuk menerapkan *Protocol on Gibraltar*, yang pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan konstitusional masing-masing negara, yaitu Spanyol dan Inggris. Protokol tersebut justru mencakup klausu perlindungan (*safeguard clause*) yang mengatur posisi hukum

kedua negara mengenai kedaulatan dan yurisdiksi atas Gibraltar, yang justru mampu memperkuat posisi Inggris dalam mengamankan wilayah Gibraltar dan memperjelas status hukum Gibraltar sebagai milik Inggris dalam kerangka BOT.⁵¹ *Protocol on Gibraltar* sama sekali tidak menyentuh diskursus terkait dengan “pemindahan kedaulatan Gibraltar” ke pihak Spanyol sebagai *external threat* dan berpotensi menguntungkan posisi Inggris sebagai *securitizing actor*.

Kerangka legislatif juga diperkuat dengan adanya *UK-EU Gibraltar Trade and Mobility Agreement - 434/2025* yang secara resmi dikeluarkan oleh *HM Government of Gibraltar* yang memperjelas status legal resmi Gibraltar sebagai bagian dari kedaulatan Inggris.⁵² Poin-poin penting dalam perjanjian ini dikemas dengan konstruksi linguistik dengan narasi keamanan tingkat tinggi sebagai respon terhadap ancaman, meliputi pernyataan seperti:

“.....a) *The Agreement does not, and will not, compromise British sovereignty over Gibraltar in any way. This will be made abundantly clear in the text of the treaty itself when this is published.* b) *Indeed, all sides have said that the Agreement is about people and not about sovereignty.* c) *It does not diminish Gibraltar’s jurisdiction. It does not reduce our control.* d) *The constitutional status of Gibraltar as an Overseas Territory of the United Kingdom and part of the British family of Nations remains unchanged....*”⁵³

Pada tahun-tahun berikutnya pasca-Brexit, pemerintah Inggris juga melakukan *Border Control Policy* sebagai manifestasi paling konkret dari tindakan luar biasa yang mencakup implementasi sistem “*dual border checks*” di pelabuhan dan bandara Gibraltar yang mirip dengan model *Eurostar* di London, St. Pancras.⁵⁴ Sistem ini merepresentasikan deviasi signifikan dari praktik perbatasan konvensional, dimana otoritas Gibraltar dan Spanyol melakukan pemeriksaan simultan terhadap arus mobilisasi keluar-masuk yang dilakukan oleh masyarakat sipil di sepanjang perbatasan. Estimasi data teknis menunjukkan bahwa pengadaan *biometric control systems* diperkirakan memerlukan investasi infrastruktur dengan kisaran sebesar £15 juta, dengan perkiraan kebutuhan instalasi sejumlah 24 *e-gates* dan *integrated passenger processing systems* yang *compatible* untuk memproses 3.000 penyebrang per jam. Implementasi sistem biometrik *dual checks* dan infrastruktur terintegrasi untuk kontrol perbatasan jarak jauh mengindikasikan investasi substansial dalam *extraordinary measures* yang tidak akan dilakukan dalam kondisi politik normal.

Selain itu, pemerintah Inggris juga menerapkan *Emergency Entry/Exit System (EES)* dan *European Travel Information and Authorization System (ETIAS)* yang mewajibkan warga Gibraltar dan Inggris yang bermukim di Gibraltar untuk mendapatkan pra-otorisasi perjalanan guna memasuki wilayah *Schengen*. Kebijakan ini mewakili tindakan darurat luar biasa yang mengubah status fundamental warga Gibraltar dari yang mulanya merupakan warga negara UE menjadi warga negara negara ketiga (*third-country nationals*) dengan status “bukan penduduk”, yang berimplikasi substantif terhadap mobilitas dan hak-hak sipil. Data administratif menunjukkan bahwa pemrosesan aplikasi ETIAS untuk penduduk Gibraltar sendiri saja memerlukan pendirian pusat pemrosesan khusus dengan kapasitas 50.000 aplikasi per tahun, mewakili infrastruktur birokrasi yang belum pernah ada sebelumnya guna mengakomodir jumlah populasi 34.000 orang *Gibraltarians* yang melintasi perbatasan setiap harinya.⁵⁵

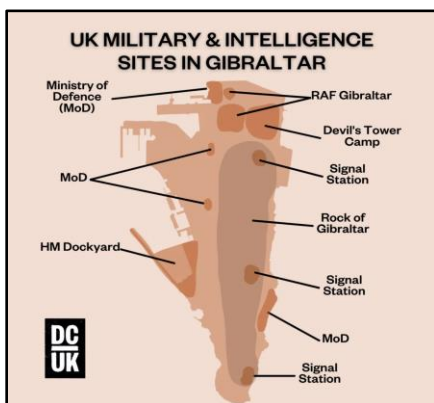
Military Support dan kehadiran militer Inggris di Gibraltar mengalami penguatan yang signifikan sebagai respons terhadap ancaman yang disekuritisasi. Dilansir dari Buku Pertahanan Inggris 2025, *“The Strategic Defence Review: Making Britain Safer: Secure at Home and Strong Abroad*, secara tegas Inggris menyebutkan bahwa: *“...Inggris akan mempertahankan kehadiran militer Inggris di Gibraltar, termasuk untuk melakukan operasi perlindungan pasukan maritim, menegakkan kedaulatan Perairan Teritorial Inggris di Gibraltar, serta menyediakan pangkalan di lokasi strategis di pintu masuk barat ke Mediterania guna memberikan dukungan penting bagi tujuan militer Inggris—dan sekutunya...”*. Inggris menunjukkan langkah luar biasa untuk mengamankan Gibraltar dengan kapasitas militernya diawali dengan pernyataan resmi yang menegaskan adanya pelaksanaan “otonomi operasional penuh” atas fasilitas militer Inggris di Gibraltar.⁵⁶

Lebih lanjut, Wakil Laksamana (*Vice-Admiral*) Gibraltar untuk Inggris, David Steel, yang memegang peran sebagai gubernur dan bertanggung jawab atas keamanan, pertahanan, serta hubungan luar negeri Gibraltar, menunjukkan aktivitas yang intens dalam beberapa waktu terakhir. Ia secara terbuka mengkritik pemerintah Spanyol karena dianggap menjadi penghambat dalam perundingan mengenai “*Gibexit*”, khususnya soal klaim atas pengelolaan bandara di wilayah Gibraltar. Sebagai langkah strategis, pemerintah Inggris telah meresmikan sebuah terminal khusus di bandara setempat yang diperuntukkan bagi personel militer yang datang maupun yang akan meninggalkan Gibraltar.⁵⁷ Dengan ini, Inggris mengerahkan *Royal Navy* dan Angkatan Udara Inggris untuk secara bebas menggunakan pangkalan Gibraltar tanpa campur tangan asing.

Dengan memperlihatkan lebih banyak kapasitas militer, London juga mengerahkan kapal perang patrol (misalnya *HMS Trent*, *HMS Forth*, dan *RFA Tidesurge*) untuk “patroli kedaulatan” di wilayah perairan Gibraltar selama ketegangan baru-baru ini, yang dicatat oleh *The Diplomat* bahwa Inggris telah melakukan “...an increase in the presence of British Navy warships in Gibraltar...”.⁵⁸ Pada Juli 2023, Gubernur Gibraltar bahkan mengadakan “patroli kedaulatan” bersama kapal angkatan laut Inggris, menunjukkan tekad mempertahankan klaim Inggris atas perairan sekitarnya sebagai respon atas negosiasi stagnan yang tak kunjung usai.

Tak hanya sampai pada patroli kedaulatan, aksi luar biasa Inggris dalam sekuritisasi juga tercermin dalam pengerahan gabungan matra pertahanan berupa AD, AL, dan AU Inggris, serta pengadaan sistem alutsista yang memperkuat posisi pertahanan Inggris atas kepemilikan kedaulatan Gibraltar. Tepat setelah Inggris resmi keluar dari Uni Eropa pada tahun 2020, bandara Gibraltar bertransformasi menjadi titik sentral operasi militer Inggris di luar wilayah nasional mereka—“*The UK uses Gibraltar Airport as a military zone.*” Bandara ini dimanfaatkan oleh Inggris sebagai pangkalan strategis angkatan bersenjata guna memperkuat kehadiran sekaligus memproyeksikan kekuatan mereka di kawasan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, angkatan bersenjata Inggris telah menghadirkan sekitar 14.000 tentara dari Angkatan Darat, 79 kapal Angkatan Laut Kerajaan (termasuk kapal selam nuklir) dan 117 pesawat militer Angkatan Udara Kerajaan.⁵⁹ Sekitar 6.000-7.000 tentara tiba dengan perahu, 4.000 tentara dengan pesawat, dan sekitar 2.000 hingga 3.000 tentara lainnya hadir dengan berbagai manuver.

Gambar 5. Situs Militer dan Intelijen Inggris di Gibraltar⁶⁰



Sumber: (Kennard, 2024)

Selain itu, Kementerian Pertahanan Inggris juga telah menempatkan sekitar 952 personilnya untuk bekerja di pangkalan tersebut dengan 528 diantaranya merupakan warga sipil, dan sisanya merupakan tentara militer. Total populasi Gibraltar sekitar 33.000 jiwa, yang berarti 5% dari seluruh penduduk Gibraltar yang sudah masuk usia kerja dipekerjakan oleh Kementerian Pertahanan untuk melakukan perlindungan terhadap kedaulatan wilayah Gibraltar.⁶¹ Menurut data resmi pemerintah Inggris, terdapat beberapa spesifikasi peningkatan matra pertahanan yang dikerahkan Inggris untuk meningkatkan sistem pertahanan dan menjaga kedaulatan Gibraltar, meliputi: penempatan 235 anggota Resimen Kerajaan Gibraltar, 28 anggota Skadron Angkatan Laut Kerajaan, 16 anggota Angkatan Udara Kerajaan, dan 145 anggota Markas Besar Angkatan Bersenjata Inggris di Gibraltar. Sejak menjadi pangkalan strategis bagi angkatan bersenjata Inggris, bandara Gibraltar telah menerima 53 pesawat – sebagian besar merupakan kiriman dari Angkatan Udara Kerajaan (RFA) Inggris: 34 pesawat A400M, satu pesawat angkut militer jarak jauh, 10 pesawat C-17A, satu lagi pesawat angkut militer berat jarak jauh; tiga pesawat C-130, tiga pesawat *Envoy IV* lainnya, serta tiga helikopter *Chinook* Angkatan Udara Kerajaan berdasarkan sensus yang dilakukan pengamat militer Michael Sanchez.⁶²

Tabel 3. Sistem Pertahanan Inggris di Gibraltar Pasca-Brexit⁶³

	Angkatan Udara (AU)	Angkatan Laut (AL)	Angkatan Darat (AD)
Jenis Matra Pertahanan	4000 Tentara dengan Pesawat	79 Angkatan Laut Kerajaan (kapal selam nuklir)	Tentara Bersenjata: 14.000
	952 Personnel AU di Pangkalan Militer Bandara	6.000-7.000 Tentara dengan Perahu (2.000 hingga 3.000 tentara tambahan dengan manuver)	Penempatan 235 anggota Resimen Kerajaan Gibraltar
	16 Anggota Angkatan Udara Kerajaan		145 anggota Markas Besar Angkatan Bersenjata

			Inggris di Gibraltar
Jenis Alutsista	53 pesawat kiriman UK's <i>RFA Tidesurge</i> ; 34 pesawat A400M; 1 pesawat angkut jarak jauh; 10 pesawat C-17A; 1 pesawat angkut militer berat jarak jauh; 3 pesawat C-130, 3 pesawat <i>Envoy IV</i> , 3 helikopter <i>Chinook</i>	28 Anggota Skwadron milik Angkatan Laut Kerajaan (2 <i>patrol boats: HMS Dagger and HMS Cutlass</i>)	

Sumber: (Reeves, 2024)

Lebih lanjut, dalam sistem manajemen pertahanan Inggris, Kementerian Pertahanan (*Ministry of Defence / MoD*) UK telah mengambil langkah signifikan dengan mengalokasikan kontrak dengan alokasi anggaran pertahanan senilai £155 juta kepada perusahaan *Mitie* untuk menyediakan layanan penting bagi *British Forces Gibraltar* (Angkatan Bersenjata Inggris di Gibraltar). Kontrak tersebut diluncurkan pada bulan Mei 2022 dan mulai berlaku pada November 2022, yang didalamnya mencakup pekerjaan pemeliharaan, perbaikan, servis, dan manajemen fasilitas keras (*hard facilities management*) di seluruh properti MoD milik Inggris di Gibraltar. Langkah ini merupakan bagian dari program *Overseas Prime Contract (OPC)* yang lebih luas, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan fasilitas militer Inggris di luar negeri. Kontrak tersebut dirancang untuk mendukung sekitar 200 pekerjaan di Gibraltar dan memberikan layanan yang lebih baik bagi personel militer yang berbasis di wilayah tersebut,⁶⁴ terutama guna mengamankan kedaulatan teritorial Gibraltar dan mengantisipasi potensi ancaman atas dilema negosiasi keanggotaan *Schengen* Gibraltar pasca-Brexit yang belum kunjung usai.

Penutup

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa Inggris telah berhasil melakukan proses sekuritisasi terhadap kedaulatan dan dilema Schengen Gibraltar pasca-Brexit. Melalui konstruksi linguistik (*speech act*) yang kuat membingkai isu sebagai ancaman eksistensial melalui pernyataan eksplisit

seperti: "UK will never enter into arrangements under which the people of Gibraltar would pass under the sovereignty of another State", mendapatkan legitimasi parsial (terutama pada aspek kedaulatan) dari audiens kunci (meski dengan paradoks dari masyarakat Gibraltar), dan menerapkan berbagai tindakan darurat luar biasa (*extraordinary measures*) baik di bidang hukum atau aspek legislatif melalui pengadaan *Protocol of Gibraltar*, kebijakan perbatasan dengan mekanisme *Eurostar Dual Border Checks*, maupun pengerahan militer penuh di wilayah Gibraltar. Dengan ini, Inggris berhasil mempertahankan klaim kedaulatannya atas wilayah "The Rock" tersebut. Lebih lanjut, penulis menilai bahwa proses sekuritisasi Inggris terhadap kedaulatan penuh Gibraltar secara eksplisit berhasil dilakukan, temuan juga menjelaskan bahwa Inggris menunjukkan sikap tanggap dengan memperluas otoritas atas hak kedaulatannya dalam negosiasi perbatasan.

Namun, keberhasilan sekuritisasi ini datang dengan beberapa konsekuensi, dimana dilema mobilitas *Schengen* bagi warga Gibraltar belum terselesaikan secara memuaskan dan justru diperparah oleh prosedur perbatasan baru yang rumit. Proses ini juga berpotensi memperdalam ketegangan dengan Spanyol dan meninggalkan masyarakat Gibraltar dalam posisi terjepit antara kesetiaan pada Inggris dan kebutuhan akan keterhubungan dengan Eropa. Sekuritisasi, dalam hal ini, lebih berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan status quo Inggris akan kedaulatan Gibraltar daripada menemukan solusi berkelanjutan untuk kompleksitas hubungan pasca-Brexit di Semenanjung Iberia. Meskipun begitu, hasil analisis berhasil menjelaskan keberhasilan upaya Inggris dalam melakukan sekuritisasi atas Gibraltar.

References

- Alexander, Harriet. "Gibraltar Urges Britain Not to Be Held Hostage by Spain during Brexit Talks." *The Telegraph*, October 21, 2016. <https://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/21/gibraltar-urges-britain-not-to-be-held-hostage-by-spain-during-b/>.
- BBC News. "EU Referendum Local Results - G." Accessed June 30, 2025. https://www.bbc.co.uk/news/politics/eu_referendum/results/local/.
- Bosque, Maria M. "Brexit and the Commonwealth: New Challenges for Gibraltar." *The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs* 106, no. 2 (2017): 183–195.

- Buzan, Barry G., Ole Wæver, and Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner, 1998.
- Clegg, Peter. "Brexit and the Overseas Territories: Repercussions for the Periphery." In *Euro-Caribbean Societies in the 21st Century: Offshore Finance, Local Elites and Contentious Politics*, edited by Sébastien Chauvin, Peter Clegg, and Bruno Cousin, 110–133. New York: Routledge, 2018.
- Courea, Eleni, and Sam Jones. "UK Close to Deal for Eurostar-Style Dual Border Controls at Gibraltar Airport." *The Guardian*, June 11, 2025. <https://www.theguardian.com/world/2025/jun/11/uk-gibraltar-border-brexit-agreement-spain>.
- Dittmer, Jason, Alasdair Pinkerton, Alex Jeffrey, and Gavin Sullivan. "Gibraltarians' Attitudes towards Brexit and the Gibraltar–Spain Frontier." *Space and Polity* 23, no. 3 (2019): 283–298. <https://doi.org/10.1080/13562576.2019.1670054>.
- Emmers, Ralf. "Securitization." In *Contemporary Security Studies*, 4th ed., edited by Alan Collins, 168–181. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Fella, Stefano. "UK–EU Agreement on Gibraltar: What Has Been Agreed?" House of Commons Library, June 2025. <https://commonslibrary.parliament.uk/uk-eu-agreement-on-gibraltar-what-has-been-agreed/>.
- Gapsa, Martina. "The Legal Status of Gibraltar after Brexit in Light of the Provisions of the Protocol on Gibraltar." *Polish Journal of Political Science* 1, no. 1 (2022): 20–29. <https://doi.org/10.58183/pjps.01122022>.
- GBC News. "Strategic Defence Review: UK Committed to Military Presence in Gibraltar." June 3, 2025. <https://www.gbc.gi/news/strategic-defence-review-uk-highlights-commitment-to-maintaining-military-presence-in-gibraltar>.
- González García, Ignacio, and Miguel Acosta Sánchez. "The Consequences of Brexit for Gibraltar." *Cuadernos de Gibraltar*, no. 3 (2019): 1–21. https://doi.org/10.25267/cuad_gibraltar.2019.i3.1302.
- González-Ocantos, Ezequiel. "Designing Qualitative Research Projects: Notes on Theory Building, Case Selection and Field Research." In *The SAGE Handbook of Research Methods in Political Science and International*

- Relations*, edited by Luigi Curini and Robert Franzese, 103–118. London: SAGE Publications, 2020.
- HM Government of Gibraltar. "UK-EU Gibraltar Trade and Mobility Agreement - 434/2025." Press release, June 2025. <https://www.gibraltar.gov.gi/press-releases/uk-eu-gibraltar-trade-and-mobility-agreement-442025-10961>.
- HM Government of Gibraltar. "Technical Notice - Schengen Entry/Exit System and the European Travel Information and Authorisation System - 522/2024." n.d. Accessed 20 July, 2024. <https://www.gibraltar.gov.gi/press-releases/technical-notice-schengen-entryexit-system-and-the-european-travel-information-and-authorisation-system-5222024-10099>.
- House of Commons UK. "Official Statement on Gibraltar Negotiations." 2024. <https://committees.parliament.uk/publications/45816/documents/226810/default/>.
- House of Commons Library UK. "Agreement Protects Sovereignty and Economic Security of Gibraltar." June 11, 2025. <https://www.gov.uk/government/news/agreement-protects-sovereignty-and-economic-security-of-gibraltar>.
- Jikia, M., and K. Jincharad. "Status of Gibraltar – The Dispute over the Sovereignty after Brexit." *European Scientific Journal* 9 (2022). <https://doi.org/10.19044/esipreprint.9.2022.p804>.
- Kennard, Matt. "Gibraltar: Britain's Militarised Rock after Brexit." *Declassified UK*, 2024. <https://www.declassifieduk.org/gibraltar-britains-militarised-rock-after-brexite/>.
- Kurniawan, Fajar Fandi, and M. Hafidz Al Ayuda. "Sengketa Gibraltar Dalam Dinamika Hukum Internasional Dan Klaim Kedaulatan." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025).
- Manzinger, K. "Post-Brexit Gibraltar – Can It Remain Prosperous and British at the Same Time?" *Kisebbsegvedelem V* (2022): 85. <http://www.kre.hu/portal/images/kiadvanyok/folyoirat/kisebbseg/2023/V-szam-2022-Kisebbsegvedelem-V-2022julius-HONLAPRA.pdf#page=85>.
- McKeon, Christopher. "UK-EU Defence Pact Could Be Linked to Gibraltar Deal – Spanish Foreign Minister." *The Independent*, 2025. <https://www.the->

[independent.com/news/uk/home-news/gibraltar-uk-government-spanish-priti-patel-government-b2749598.html](https://www.independent.com/news/uk/home-news/gibraltar-uk-government-spanish-priti-patel-government-b2749598.html).

Meinen, Loes. "A 'Frictionless' Border for Gibraltar: Stumbling Blocks and Solutions Following Brexit." *Legal Issues of Economic Integration* 45, no. 4 (2018): 397–411. <https://doi.org/10.54648/leie2018023>.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.

Ministry of Defence and Defence Infrastructure Organisation. "MOD Awards £155m Contract to Provide Crucial Services to UK Armed Forces in Gibraltar." Press release, March 17, 2022. <https://www.gov.uk/government/news/mod-awards-155m-contract-to-provide-crucial-services-to-uk-armed-forces-in-gibraltar>.

Modebadze, V. "The Issue of Gibraltar's Sovereignty and Spain's Territorial Integrity: What Could Spain Do to Resolve the Gibraltar Problem?" *Journal of Social Sciences* 7, no. 1 (2011): 43–48.

O'Dubhghaill, Seán M., and Sven Van Kerckhoven. "Between a Rock and a Hard Place: European Disintegration, Brexit, and Gibraltar." *Politics and Governance* 11, no. 3 (2023): 59–67. <https://doi.org/10.17645/pag.v11i3.6777>.

Rahmadan, Yanuar. "The Gibraltar Issue: A Framing and Discourse Analysis of Spain During the Brexit Negotiation." *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31957/pjdir.v4i1.3164>.

Ramirez, Miguel. "Will the UK 'Give Up' Gibraltar Next? In Spain, We're More Worried about Brexit's Absurdities." *The Guardian*, October 10, 2024. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/oct/10/will-the-uk-give-up-gibraltar-next-in-spain-were-more-worried-about-brexit-absurdities>.

Reeves, Edmond. "The UK Uses Gibraltar Airport as a Military Zone." *Gibraltar Chronicle*, June 27, 2024.

Reyes, Brian. "Historic Agreement on Rock's Post-Brexit Future Is 'a Moment of Progress, Clarity and Optimism.'" *Gibraltar Chronicle*, 2025. <https://www.chronicle.gi/historic-agreement-on-rocks-post-brexit-future-is-a-moment-of-progress-clarity-and-optimism/>.

Ruffa, Chiara. "Case Study Methods: Case Selection and Case Analysis." In *The SAGE Handbook of Research Methods in Political Science and International Relations*, edited by Luigi Curini and Robert Franzese, 1133–1148. London: SAGE Publications, 2020.

The Diplomat. "Gibraltar Governor Conducts 'Sovereignty Patrol' of Waters around the Rock." July 4, 2023. <https://thediplotatinspain.com/en/2023/07/04/gibraltar-governor-conducts-sovereignty-patrol-of-waters-around-the-rock/>.

Endnotes

1. Kurniawan, Fajar Fandi, and M. Hafidz Al Ayuda. "Sengketa Gibraltar Dalam Dinamika Hukum Internasional Dan Klaim Kedaulatan." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025).
2. O'Dubhghaill, Seán M., and Sven Van Kerckhoven. "Between a Rock and a Hard Place: European Disintegration, Brexit, and Gibraltar." *Politics and Governance* 11, no. 3 (2023): 59–67. <https://doi.org/10.17645/pag.v11i3.6777>.
3. Gařsa, Martina. "The Legal Status of Gibraltar after Brexit in Light of the Provisions of the Protocol on Gibraltar." *Polish Journal of Political Science* 1, no. 1 (2022): 20–29. <https://doi.org/10.58183/pjps.01122022>.
4. Clegg, Peter. "Brexit and the Overseas Territories: Repercussions for the Periphery." In *Euro-Caribbean Societies in the 21st Century: Offshore Finance, Local Elites and Contentious Politics*, edited by Sébastien Chauvin, Peter Clegg, and Bruno Cousin, 110–133. New York: Routledge, 2018.
5. *Ibid.*
6. Sandford, Alasdair. "Brexit Timeline 2016–2020: Key Events in the UK's Path from Referendum to EU Exit." *Euronews*, January 30, 2020. <https://www.euronews.com/2020/01/30/brexit-timeline-2016-2020-key-events-in-the-uk-s-path-from-referendum-to-eu-exit>.
7. Meinen, Loes. "A 'Frictionless' Border for Gibraltar: Stumbling Blocks and Solutions Following Brexit." *Legal Issues of Economic Integration* 45, no. 4 (2018): 397–411. <https://doi.org/10.54648/leie2018023>.
8. Clegg, Peter. "Brexit and the Overseas Territories: Repercussions for the Periphery." In *Euro-Caribbean Societies in the 21st Century: Offshore Finance, Local Elites and Contentious Politics*, edited by Sébastien Chauvin, Peter Clegg, and Bruno Cousin, 110–133. New York: Routledge, 2018.
9. Bosque, Maria M. "Brexit and the Commonwealth: New Challenges for Gibraltar." *The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs* 106, no. 2 (2017): 183–195.
10. *Ibid.*
11. *Ibid.*
12. Buzan, Barry G., Ole Wæver, and Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner, 1998.
13. *Ibid.*

14. Emmers, Ralf. "Securitization." In *Contemporary Security Studies*, 4th ed., edited by Alan Collins, 168–181. Oxford: Oxford University Press, 2016.
15. Buzan, Barry G., Ole Wæver, and Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner, 1998.
16. *Ibid.*
17. *Ibid.*
18. González-Ocantos, Ezequiel. "Designing Qualitative Research Projects: Notes on Theory Building, Case Selection and Field Research." In *The SAGE Handbook of Research Methods in Political Science and International Relations*, edited by Luigi Curini and Robert Franzese, 103–118. London: SAGE Publications, 2020.
19. Ruffa, Chiara. "Case Study Methods: Case Selection and Case Analysis." In *The SAGE Handbook of Research Methods in Political Science and International Relations*, edited by Luigi Curini and Robert Franzese, 1133–1148. London: SAGE Publications, 2020.
20. *Ibid.*
21. Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
22. GBC News. "Strategic Defence Review: UK Committed to Military Presence in Gibraltar." June 3, 2025. <https://www.gbc.gi/news/strategic-defence-review-uk-highlights-commitment-to-maintaining-military-presence-in-gibraltar>.
23. Buzan, Barry G., Ole Wæver, and Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner, 1998.
24. House of Commons UK. "Official Statement on Gibraltar Negotiations." 2024. <https://committees.parliament.uk/publications/45816/documents/226810/default/>.
25. *Ibid.*
26. *Ibid.*
27. Fella, Stefano. "UK–EU Agreement on Gibraltar: What Has Been Agreed?" House of Commons Library, June 2025. <https://commonslibrary.parliament.uk/uk-eu-agreement-on-gibraltar-what-has-been-agreed/>.
28. *Ibid.*
29. McKeon, Christopher. "UK-EU Defence Pact Could Be Linked to Gibraltar Deal – Spanish Foreign Minister." *The Independent*, 2025. <https://www.the-independent.com/news/uk/home-news/gibraltar-uk-government-spanish-priti-patel-government-b2749598.html>.
30. Rahmadan, Yanuar. "The Gibraltar Issue: A Framing and Discourse Analysis of Spain During the Brexit Negotiation." *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31957/pjdir.v4i1.3164>.
31. Alexander, Harriet. "Gibraltar Urges Britain Not to Be Held Hostage by Spain during Brexit Talks." *The Telegraph*, October 21, 2016. <https://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/21/gibraltar-urges-britain-not-to-be-held-hostage-by-spain-during-b/>.
32. Rahmadan, Yanuar. "The Gibraltar Issue: A Framing and Discourse Analysis of Spain During the Brexit Negotiation." *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31957/pjdir.v4i1.3164>.
33. Asquez, R. "In Perspective: When Spain Closed the Frontier, It Made Gibraltarians Mistrust Spain Forever." *Gibraltar Panorama*, January 18, 2022. <http://www.gibraltarpanorama.gi/177569>.

34. Rahmadan, Yanuar. "The Gibraltar Issue: A Framing and Discourse Analysis of Spain During the Brexit Negotiation." *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31957/pjdir.v4i1.3164>.
35. Fella, Stefano. "UK–EU Agreement on Gibraltar: What Has Been Agreed?" House of Commons Library, June 2025. <https://commonslibrary.parliament.uk/uk-eu-agreement-on-gibraltar-what-has-been-agreed/>.
36. McKeon, Christopher. "UK-EU Defence Pact Could Be Linked to Gibraltar Deal – Spanish Foreign Minister." *The Independent*, 2025. <https://www.the-independent.com/news/uk/home-news/gibraltar-uk-government-spanish-priti-patel-government-b2749598.html>.
37. Jikia, M., and K. Jincharad. "Status of Gibraltar – The Dispute over the Sovereignty after Brexit." *European Scientific Journal* 9 (2022). <https://doi.org/10.19044/esipreprint.9.2022.p804>.
38. Meinen, Loes. "A 'Frictionless' Border for Gibraltar: Stumbling Blocks and Solutions Following Brexit." *Legal Issues of Economic Integration* 45, no. 4 (2018): 397–411. <https://doi.org/10.54648/leie2018023>.
39. BBC News. "EU Referendum Local Results - G." Accessed June 30, 2025. https://www.bbc.co.uk/news/politics/eu_referendum/results/local/g.
40. Ramirez, Miguel. "Will the UK 'Give Up' Gibraltar Next? In Spain, We're More Worried about Brexit's Absurdities." *The Guardian*, October 10, 2024. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/oct/10/will-the-uk-give-up-gibraltar-next-in-spain-were-more-worried-about-brexit-absurdities>.
41. Reyes, Brian. "Historic Agreement on Rock's Post-Brexit Future Is 'a Moment of Progress, Clarity and Optimism.'" *Gibraltar Chronicle*, 2025. <https://www.chronicle.gi/historic-agreement-on-rocks-post-brexit-future-is-a-moment-of-progress-clarity-and-optimism/>.
42. Manzinger, K. "Post-Brexit Gibraltar – Can It Remain Prosperous and British at the Same Time?" *Kisebbsegvedelem V* (2022): 85. <http://www.kre.hu/portal/images/kiadvanyok/folyoirat/kisebbseg/2023/V-szam-2022-Kisebbsegvedelem-V-2022julius-HONLAPRA.pdf#page=85>.
43. Dittmer, Jason, Alasdair Pinkerton, Alex Jeffrey, and Gavin Sullivan. "Gibraltarians' Attitudes towards Brexit and the Gibraltar–Spain Frontier." *Space and Polity* 23, no. 3 (2019): 283–298. <https://doi.org/10.1080/13562576.2019.1670054>.
44. *Ibid.*
45. *Ibid.*
46. Buzan, Barry G., Ole Wæver, and Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner, 1998.
47. Gapsa, Martina. "The Legal Status of Gibraltar after Brexit in Light of the Provisions of the Protocol on Gibraltar." *Polish Journal of Political Science* 1, no. 1 (2022): 20–29. <https://doi.org/10.58183/pjps.01122022>.
48. González García, Ignacio, and Miguel Acosta Sánchez. "The Consequences of Brexit for Gibraltar." *Cuadernos de Gibraltar*, no. 3 (2019): 1–21. https://doi.org/10.25267/cuad_gibraltar.2019.i3.1302.
49. Gapsa, Martina. "The Legal Status of Gibraltar after Brexit in Light of the Provisions of the Protocol on Gibraltar." *Polish Journal of Political Science* 1, no. 1 (2022): 20–29. <https://doi.org/10.58183/pjps.01122022>.
50. *Ibid.*

51. González García, Ignacio, and Miguel Acosta Sánchez. "The Consequences of Brexit for Gibraltar." *Cuadernos de Gibraltar*, no. 3 (2019): 1–21. https://doi.org/10.25267/cuad_gibraltar.2019.i3.1302.
52. HM Government of Gibraltar. "UK-EU Gibraltar Trade and Mobility Agreement - 434/2025." Press release, June 2025. <https://www.gibraltar.gov.gi/press-releases/uk-eu-gibraltar-trade-and-mobility-agreement-442025-10961>.
53. *Ibid.*
54. Courea, Eleni, and Sam Jones. "UK Close to Deal for Eurostar-Style Dual Border Controls at Gibraltar Airport." *The Guardian*, June 11, 2025. <https://www.theguardian.com/world/2025/jun/11/uk-gibraltar-border-brexit-agreement-spain>.
55. Meinen, Loes. "A 'Frictionless' Border for Gibraltar: Stumbling Blocks and Solutions Following Brexit." *Legal Issues of Economic Integration* 45, no. 4 (2018): 397–411. <https://doi.org/10.54648/leie2018023>.
56. HM Government of Gibraltar. "Technical Notice - Schengen Entry/Exit System and the European Travel Information and Authorisation System - 522/2024." n.d. Accessed 20 July, 2024. <https://www.gibraltar.gov.gi/press-releases/technical-notice-schengen-entryexit-system-and-the-european-travel-information-and-authorisation-system-5222024-10099>.
57. The Diplomat. "Gibraltar Governor Conducts 'Sovereignty Patrol' of Waters around the Rock." July 4, 2023. <https://thediplomatinspain.com/en/2023/07/04/gibraltar-governor-conducts-sovereignty-patrol-of-waters-around-the-rock/>.
58. *Ibid.*
59. Reeves, Edmond. "The UK Uses Gibraltar Airport as a Military Zone." *Gibraltar Chronicle*, June 27, 2024.
60. *Ibid.*
61. Kennard, Matt. "Gibraltar: Britain's Militarised Rock after Brexit." *Declassified UK*, 2024. <https://www.declassifieduk.org/gibraltar-britains-militarised-rock-after-brexit/>.
62. *Ibid.*
63. Reeves, Edmond. "The UK Uses Gibraltar Airport as a Military Zone." *Gibraltar Chronicle*, June 27, 2024.
64. Ministry of Defence and Defence Infrastructure Organisation. "MOD Awards £155m Contract to Provide Crucial Services to UK Armed Forces in Gibraltar." Press release, March 17, 2022. <https://www.gov.uk/government/news/mod-awards-155m-contract-to-provide-crucial-services-to-uk-armed-forces-in-gibraltar>.